



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR M.HH-01.OT.01.01 TAHUN 2024

TENTANG

**RENCANA AKSI PERCEPATAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka penetapan Rencana Aksi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024, maka perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4700);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4916);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1664);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1630);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900);
11. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.OT.01.01 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2024;
12. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.OT.01.01 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-09.OT.01.01 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.OT.01.01 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG RENCANA AKSI PERCEPATAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.
- KESATU : Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan sarana pengendalian capaian kinerja prioritas dalam mencapai tujuan organisasi yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- KEDUA : Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja bertujuan untuk:
1. Media untuk membangun komitmen dalam mencapai kinerja yang diharapkan dan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja organisasi;

2. Arah kebijakan dan strategi bersama dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja serta sebagai dasar kolaborasi pelaksanaan kegiatan dan sinergi dengan pemangku kepentingan;
3. Sarana untuk monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja.

KETIGA : Seluruh Kepala Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan dari Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024.

KEEMPAT : Laporan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Unit utama bertanggung jawab atas seluruh pelaporan capaian rencana aksi baik tingkat pusat maupun kantor wilayah;
2. Pelaporan capaian rencana aksi dilakukan dengan mengisi *matriks* serta bukti pendukung melalui *link* yang akan disampaikan kemudian;
3. Seluruh satuan kerja menyusun laporan tertulis hasil evaluasi mandiri (*self assessment*) terhadap pelaksanaan capaian rencana aksi;
4. Waktu pelaporan capaian rencana aksi dilaksanakan setiap bulannya pada tanggal 10 bulan berikutnya;
5. Evaluasi capaian Rencana Aksi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan setiap semester melalui rapat koordinasi capaian kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

KELIMA : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat memberikan sanksi administratif dalam hal:

1. Kepala Satuan Kerja yang tidak melaksanakan rencana aksi percepatan perjanjian kinerja;
2. Kepala Satuan Kerja yang telah melaksanakan rencana aksi percepatan perjanjian kinerja tetapi tidak memenuhi target kinerja yang telah ditentukan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2024

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



YASONNA H. LAOLY

RENCANA AKSI DIVISI ADMINISTRASI TAHUN 2024

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
SEKRETARIAT JENDERAL					
1	Evaluasi terhadap capaian kinerja tidak dilakukan seluruh satker secara periodik	Januari - Februari	Pendampingan penyusunan LKjIP	1. LKjIP Kemenkumham Tahun 2023 2. LKjIP UKE 1 Tahun 2023 3. LKjIP Kantor Wilayah Tahun 2023 4. LKjIP UPT Tahun 2023	Biro Perencanaan APIP Unit Eselon I Divisi Administrasi (Bagian Program dan Humas / Sub Bagian Program dan Pelaporan)
2	Data pengembangan kompetensi Kemenkumham yang belum dilakukan secara keseluruhan	Januari- Februari	Pemutakhiran Data 2023 Indikator : (Data Kualifikasi Pendidikan, Data Kompetensi, Data Kinerja, Data Disiplin)	Laporan hasil pemutakhiran data 2023	Biro SDM Unit Eselon I Divisi Administrasi (Bagian Umum / Sub Bagian Kepegawaian, TU & RT) UPT
		Januari- Februari	Pemetaan Data 2025 (Data Kualifikasi Pendidikan, Data Kompetensi, Data Kinerja, Data Disiplin)	Laporan pemetaan data 2025	Biro SDM Unit Eselon I Divisi Administrasi (Bagian Umum / Sub Bagian Kepegawaian, TU & RT) UPT
		Januari - Desember	Implementasi Corporate University di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham minimal 25% pegawai per triwulan (Januari s/d Desember)	Laporan triwulan implementasi Corporate University di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham	Divisi Administrasi (Bagian Umum / Sub Bagian Kepegawaian, TU & RT) UPT
3.	Belum optimalnya nilai Indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Penyerapan Anggaran sehingga berpengaruh terhadap capaian IKPA	April - Juni	1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Triwulan I TA 2024; 2. Tindak Lanjut Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2024.	1. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Triwulan I TA 2024; 2. Surat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2024 kepada Kantor Wilayah.	Divisi Administrasi (Bagian Umum / Sub Bagian Pengelolaan Keuangan & BMN) UPT
		Juli - September	1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Semester I TA 2024; 2. Tindak Lanjut Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Semester I TA 2024.	1. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Semester I TA 2024; 2. Surat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Semester I TA 2024 kepada Kantor Wilayah.	Divisi Administrasi (Bagian Umum / Sub Bagian Pengelolaan Keuangan & BMN) UPT
		Oktober - November	1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Triwulan III TA 2024; 2. Tindak Lanjut Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan III TA 2024.	1. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Triwulan III TA 2024; 2. Surat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan III TA 2024 kepada Kantor Wilayah.	Divisi Administrasi (Bagian Umum / Sub Bagian Pengelolaan Keuangan & BMN) UPT

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
4.	Satuan Kerja Tidak Menyampaikan Usulan RKBMN	Juni - Juli	Kantor Wilayah melakukan pendampingan Pra Penyusunan RKBMN	Laporan Kegiatan Pra Penyusunan RKBMN	Divisi Administrasi (Bagian Umum / Sub Bagian Pengelolaan Keuangan & BMN)
5.	Satuan kerja belum menyampaikan Laporan Wasdal tepat waktu dan belum sesuai ketentuan	Januari dan Juli	Menyusun Laporan Wasdal tingkat Wilayah Semester II Tahun 2023 dan Semester I Tahun 2024	Laporan Wasdal tingkat Wilayah Semester II Tahun 2023 dan Semester I Tahun 2024	Divisi Administrasi (Bagian Umum / Sub Bagian Pengelolaan Keuangan & BMN)
6.	Belum optimalnya kualitas nilai pengawasan kearsipan internal dalam pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Januari	Membuat SK Tim Pengawasan	SK TIM Pengawasan arsip Kantor Wilayah	Divisi Administrasi (Bagian Umum / Sub Bagian Kepegawaian, TU & RT)
		Januari - Juni	Implementasi pengawasan kearsipan internal sesuai dengan LKE	Laporan implementasi pengawasan kearsipan internal	Divisi Administrasi (Bagian Umum / Sub Bagian Kepegawaian, TU & RT)
		Juli - Desember	Monitoring dan evaluasi hasil dari pelaksanaan pengawasan kearsipan internal	Laporan monev dan rekomendasi hasil pengawasan kearsipan internal	Divisi Administrasi (Bagian Umum / Sub Bagian Kepegawaian, TU & RT) Biro Umum
7.	Penyelenggaraan Aplikasi Khusus di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum sesuai ketentuan Pasal 36 dan Pasal 39 Permenkumham 30/2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Februari-April	Melakukan pendataan Aplikasi Khusus di lingkungan Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis melalui aplikasi Simdatin	Dokumen data Aplikasi Khusus di lingkungan Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis	Divisi Administrasi (Bagian Program dan Humas / Sub Bagian Humas, RB & TI)
		Maret-Juni	Melaksanakan rekomendasi hasil verifikasi dan uji kelaikan keamanan oleh Pusdatin	Dokumen perbaikan aplikasi	

INSPEKTORAT JENDERAL

8.	Pengawasan atas capaian Prioritas Nasional (PN) belum optimal dibuktikan dengan belum optimalnya kegiatan pengawasan APIP pada setiap Prioritas Nasional Kemenkumham	Triwulan	Laporan Triwulanan evaluasi pelaksanaan dari Kanwil ke UKE I, UKE I ke Biro Perencanaan, Biro Perencanaan ke Itjen	Outcome : Capaian Program Prioritas Kementerian Hukum dan HAM tepat sasaran dan berdampak pada masyarakat Output / Data Dukung dari Itjen: Laporan APIP Hasil Evaluasi Capaian Prioritas Nasional di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Inspektorat Jenderal Sekretariat Jenderal Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Bidang Hukum / Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum) Unit Eselon I
		Triwulan	Evaluasi Triwulanan oleh Itjen		
		Triwulan	Penyampaian laporan di Minggu pertama setiap triwulan		

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
9.	Penerapan integritas belum optimal dibuktikan dengan Indeks Integritas Kementerian Hukum dan HAM yang menurun berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas KPK	Sepanjang tahun	Glorifikasi peningkatan integritas dan budaya anti korupsi Satker yang diputar setiap hari (Berupa rekaman tentang budaya integritas)	<p>Outcome : Meningkatnya Budaya Integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang dibuktikan dengan perolehan Indeks SPI yang meningkat dari tahun sebelumnya (berdasarkan penilaian KPK)</p> <p>Output / Data Dukung dari Itjen: 1. Matriks Tindak Lanjut hasil Penilaian Integritas (SPI-KPK) Tahun 2023 2. Laporan Pelaksanaan Penguatan/ Sosialisasi atas Survei Penilaian Integritas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 3. Laporan KPK tentang hasil SPI Kemenkumham Tahun 2024</p>	Inspektorat Jenderal Seluruh UKE I Divisi Administrasi (Bagian Program dan Humas / Sub Bagian Humas, RB & TI) Seluruh UPT
		Triwulan I	Tindak lanjut hasil SPI 2023		
		Triwulan II	a. Penetapan responden eksternal dan internal yang tepat b. Sosialisasi kepada responden eksternal		
		Triwulan III	Pelaksanaan Survei oleh KPK		
		Triwulan III	Hasil survei		

RENCANA AKSI DIVISI KEIMIGRASIAN TAHUN 2024

No	Isu Permasalahan Tusi	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
1.	Perluasan pelayanan e-Paspor di seluruh kantor imigrasi.	Januari - Maret	1. Rapat Persiapan Perluasan pelayanan e-paspor 2. Penetapan Kantor Imigrasi penerbit e-Paspor 3. Rapat Pembahasan Pengaturan Distribusi Blangko dan Kuota Penerbitan Paspor Biasa Elektronik pada Kantor Imigrasi 4. Sosialisasi Perluasan pelayanan e-paspor	1. Notula Rapat Persiapan 2. Penetapan Kantor Imigrasi penerbit e-Paspor 3. Notula Rapat Pembahasan 4. Laporan sosialisasi	Divisi Keimigrasian
		April - Juni	Pemantauan Perluasan pelayanan e-paspor Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Laporan Pemantauan Perluasan pelayanan e-paspor Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	
		Juli - September	Pemantauan Perluasan pelayanan e-paspor Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Laporan Pemantauan Perluasan pelayanan e-paspor Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	
		Oktober - Desember	Pemantauan Perluasan pelayanan e-paspor Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Laporan Pemantauan Perluasan pelayanan e-paspor Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	
2.	Tingginya demand paspor belum dapat diimbangi dengan kapasitas produksi	Januari- Maret	1. Melakukan pemetaan analisa kebutuhan pelayanan paspor dalam di unit satuan kerja 2. Penambahan kuota merujuk pada hasil pemetaan analisa kebutuhan	1. Peta analisa kebutuhan pelayanan paspor dalam di unit satuan kerja 2. Penambahan kuota merujuk pada hasil pemetaan analisa kebutuhan	Divisi Keimigrasian
		April-Juni	Kegiatan Pembinaan Pengendalian Pengawasan Pelaksanaan TugasTeknis Peningkatan Penerbitan Paspor pada Kantor Imigrasi di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Laporan Kegiatan Pembinaan Pengendalian Pengawasan Pelaksanaan TugasTeknis Peningkatan Penerbitan Paspor pada Kantor Imigrasi di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	
		Juli-September	Kegiatan Pembinaan Pengendalian Pengawasan Pelaksanaan TugasTeknis Peningkatan Penerbitan Paspor pada Kantor Imigrasi di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Laporan Kegiatan Pembinaan Pengendalian Pengawasan Pelaksanaan TugasTeknis Peningkatan Penerbitan Paspor pada Kantor Imigrasi di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	
		Oktober - Desember	Kegiatan Pembinaan Pengendalian Pengawasan Pelaksanaan TugasTeknis Peningkatan Penerbitan Paspor pada Kantor Imigrasi di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Laporan Kegiatan Pembinaan Pengendalian Pengawasan Pelaksanaan TugasTeknis Peningkatan Penerbitan Paspor pada Kantor Imigrasi di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	
3.	Meningkatnya kasus TPPO dan TPPM lintas negara	Januari- Desember	1. Meningkatkan kesadaran masyarakat (<i>awareness</i>) melalui pengayaan (<i>enrichment</i>) fungsi desa binaan imigrasi 2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait	1. Laporan Kegiatan 2. Laporan Koordinasi	Divisi Keimigrasian
4.	Pengawasan dan penindakan keimigrasian belum optimal	Januari- Maret	1. Pengetatan target sasaran 2. Pengetatan pengendalian petugas	1. Laporan Pengetatan sasaran 2. Laporan Pengendalian Petugas	Divisi Keimigrasian
		April-Juni	Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait	Laporan Koordinasi	
		Juli-September	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung	Laporan Peningkatan sarana dan prasarana pendukung	
		Oktober - Desember	Evaluasi pelaksanaan tugas	Laporan Evaluasi	

RENCANA AKSI DIVISI PEMASYARAKATAN TAHUN 2024

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
KANWIL					
1	Pemenuhan Hak Integrasi Warga Binaan Pemasyarakatan di wilayah	Januari	1) - Pemetaan kebutuhan PK dan APK pada Lapas dan Rutan.	1) -Laporan Pemetaan kebutuhan PK dan APK pada Lapas dan Rutan.	DIVISI PEMASYARAKATAN
			2) Pembentukan Tim Pelaksana SPPT TI Wilayah Tahun 2024	2) SK Tim Pelaksana SPPT TI Wilayah Tahun 2024	
			3) Pemetaan terhadap Lapas yang berpotensi menjadi lapas produktif	3) Laporan Pemetaan terhadap Lapas yang berpotensi menjadi lapas produktif.	
		Februari	1) - Pemetaan kebutuhan PK dan APK pada Lapas dan Rutan.	1) -Laporan Pemetaan kebutuhan PK dan APK pada Lapas dan Rutan.	DIVISI PEMASYARAKATAN
			2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	
			3) Penetapan terhadap Lapas yang berpotensi menjadi lapas produktif (pilloting)	3) Laporan Penetapan terhadap Lapas yang berpotensi menjadi lapas produktif (pilloting)	
		Maret	1) -Sosialisasi terkait Penetapan wilayah pilloting serta mekanisme dan sistem kerja PK dan APK pada Lapas/ Rutan	1) laporan Sosialisasi terkait Penetapan wilayah pilloting serta mekanisme dan sistem kerja PK dan APK pada Lapas/ Rutan (piloting)	DIVISI PEMASYARAKATAN
			2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	
			3) Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di UPT Piloting	3) Laporan Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di UPT Piloting;	
		April	1) -Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan;	1) - Laporan Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan;	DIVISI PEMASYARAKATAN
			2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	
			3) Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di wilayah	3) Laporan Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di wilayah ;	
		Mei	1)- Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK yang mel di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan;	1) - Laporan Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan;	DIVISI PEMASYARAKATAN
			- Sosialisasi hasil kajian dan urgensi pelaksanaan Litmas online serta pelaksanaan diskusi bersama pemangku kepentingan terkait.	- Laporan Sosialisasi hasil kajian dan urgensi pelaksanaan Litmas online serta pelaksanaan diskusi bersama pemangku kepentingan terkait	
				2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
			3) Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di wilayah	3) Laporan Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di wilayah ;	
		Juni	1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi PK dan APK pada Lapas dan Rutan wilayah piloting;.	1) Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi PK dan APK pada Lapas dan Rutan wilayah piloting.	DIVISI PEMASYARAKATAN
			2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	
			3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi;	3) Laporan Monitoring dan Evaluasi	
		Juli	1) -Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasarakatan;	1) - Laporan Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasarakatan;	DIVISI PEMASYARAKATAN
			2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	
			3) Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di wilayah;	3) Laporan Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di wilayah ;	
		Agustus	1) -Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasarakatan:	1) - Laporan Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasarakatan;	DIVISI PEMASYARAKATAN
			2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	
			3) Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di wilayah;	3) Laporan Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di wilayah;	
		September	1) -Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasarakatan; - Sosialisasi SOP Litmas Online	1) - Laporan Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasarakatan; - Laporan Sosialisasi SOP Litmas Online	DIVISI PEMASYARAKATAN
			2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	
			3) Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di wilayah;	3) Laporan Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di wilayah ;	
		Oktober	1) Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasarakatan; - Sosialisasi SOP Litmas Online	1) -Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasarakatan; - Laporan Sosialisasi SOP Litmas Online	DIVISI PEMASYARAKATAN
			2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	
			3) Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di wilayah;	3) Laporan Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di wilayah;	
		November	1) -Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasarakatan; - Sosialisasi SOP Litmas Online	1) -Laporan Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasarakatan; - Laporan Sosialisasi SOP Litmas Online	DIVISI PEMASYARAKATAN

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI	HASIL	PENANGGUNG JAWAB
		2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	
		3) Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di wilayah;	3) Laporan Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di wilayah	
	Desember	1) Monitoring dan Evaluasi tugas dan fungsi PK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasarakatan;	1) Laporan Monitoring dan Evaluasi tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasarakatan.	DIVISI PEMASYARAKATAN
		2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	
		3) -Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi;	3) -Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi;	

RENCANA AKSI DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM TAHUN 2024

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
DITJEN PP					
1.	Peningkatan Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Mengharmonisasikan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, DPRD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah.	Januari	Menetapkan SK Tim Pembagian Kelompok Kerja dalam proses Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi dan SK Pembagian Wilayah Kerja (Zonasi) Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan	SK Tim Pembagian Kelompok Kerja dalam proses Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi dan SK Pembagian Wilayah Kerja (Zonasi) Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Bidang Hukum, Sub Bidang Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah)
		Februari	Melakukan koordinasi kegiatankoordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemda Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Sekretariat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota	Laporan Kegiatan hasil koordinasi dengan melampirkan: a. dalam hal Kanwil menyelenggarakan kegiatan rapatkoordinasi, data dukung berupa: undangan, daftar hadir, Notula, dan Dokumentasi: b. dalam hal Kanwil datang langsung ke Pemda Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Sekretariat DPRD Provinsi/kabupaten/Kota, data dukung berupa: Surat tugas, notula dan dokumentasi	
		Maret- November	Mengharmonisasikan Rancangan Peraturan Daerah yangberasal dari Pemerintah Daerah, Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD, dan Rancangan Kepala Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (memasukkan semua berkas ke dalam aplikasi SIPDDAH)	Laporan kegiatan yang melampirkan: a. dalam hal kegiatan Pengharmonisasian,pembulatan dan pemantapan konsepsi, data dukung berupa: Raperda 1) Surat Permohonan Pengharmonisasian; 2) Penjelasan/Keterangan 3) Raperda yang telah mendapatkan paraf persetujuan dari Sekda dan Pemrakarsa 4) SK Tim Pembentukan Tim Penyusun Raperda 5) SK Pembentukan Propemperda beserta daftar lampiran Propemperda atau SK Keputusan bersama antara Kepala Daerah dengan Ketua DPRD yang menyatakan pembentukan rancangan di luar Propemperda. Raperkada 1. Surat Permohonan Pengharmonisasian 2. Penjelasan/Keterangan 3. Raperkada yang telah mendapatkan paraf persetujuan dari Sekda dan Pemrakarsa 4. SK Kepala Daerah Propemperkada beserta daftar lampiran Propemperkada atau SK Keputusan Kepala Daerah yang menyatakan pembentukan rancangan di luar Propemperkada. b. dalam hal kegiatan selain pengharmonisasian,pembulatan dan pemantapan konsepsi, data dukung berupa Surat tugas/daftar hadir,notula dan dokumentasi	
		Desember	Penyusunan dan Penyampaian Laporan kegiatan Pengharmonisasian Raperda yang berasal dari Pemerintah	Laporan Kegiatan Pengharmonisasian Raperda yang berasal dari Pemerintah Daerah,Raperda yang berasal dari DPRD, dan Raperkada oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	
DITJEN HAM					
2.	Kurangnya pemahaman Masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pelaku Usaha terkait Bisnis dan HAM di Wilayah	Januari	Rapat Koordinasi terkait persiapan pembentukan Gugus Tugas Daerah (GTD) BHAM	Laporan hasil koordinasi persiapan pembentukan GTD BHAM	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Bidang HAM, Sub Bidang Pemajuan HAM)
		Februari	Rapat penyusunan draft SK GTD BHAM	Draft SK GTD BHAM	
		Maret	Penguahan GTD BHAM sesuai Perpres No. 60 Tahun 2023	SK GTD BHAM sesuai Perpres No. 60 Tahun 2023	

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
		April	Rapat Kesekretariatan GTD BHAM	Laporan Rapat Kesekretariatan GTD BHAM	
		Mei	Pelaksanaan Bimtek terkait Stranas Bisnis dan HAM	Laporan Bimtek Stranas Bisnis dan HAM	
		Juni	Pelaksanaan Bimtek terkait Stranas Bisnis dan HAM	Laporan Bimtek Stranas Bisnis dan HAM	
		Juli	1.a. Pelaksanaan Bimtek terkait Stranas Bisnis dan HAM 1. b. Pendampingan Pelaksanaan Uji Tuntas melalui Pengisian Aplikasi PRISMA	1.a. Laporan Bimtek Stranas Bisnis dan HAM 1. b. Laporan pendampingan	
		Agustus	1. Pelaksanaan Bimtek terkait Stranas Bisnis dan HAM 2. Pendampingan Pelaksanaan Uji Tuntas melalui Pengisian Aplikasi PRISMA	1. Laporan Bimtek Stranas Bisnis dan HAM 2. Laporan pendampingan	
		September	1. Pelaksanaan Bimtek terkait Stranas Bisnis dan HAM 2. Pendampingan Pelaksanaan Uji Tuntas melalui Pengisian Aplikasi PRISMA 3. Pelaksanaan Penanganan Pengaduan permasalahan BHAM	1. Laporan Bimtek Stranas Bisnis dan HAM 2. Laporan pendampingan 3. Laporan Pelaksanaan	
		Oktober	1. Monitoring dan Evaluasi Capaian Aksi dan Implementasi Pelaksanaan Stranas BHAM 2. Pelaksanaan Penanganan Pengaduan permasalahan BHAM	1. Laporan Monitoring Capaian Aksi dan Implementasi Bisnis dan HAM Daerah 2. Laporan Pelaksanaan	
		November	1. Evaluasi Capaian Aksi dan Implementasi Pelaksanaan Stranas BHAM Daerah 2. Pelaksanaan Penanganan Pengaduan permasalahan BHAM	1. Laporan Evaluasi Capaian Aksi dan Implementasi Pelaksanaan Bisnis dan HAM Daerah 2. Laporan Pelaksanaan	
		Desember	1. Penyampaian Laporan Monev dan Tindak Lanjut Aksi serta Implementasi Pelaksanaan Bisnis dan HAM Daerah 2. Evaluasi penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan BHAM	1. Laporan Monev dan Tindak Lanjut serta Implementasi Aksi Bisnis dan HAM Daerah 2. Laporan Evaluasi dugaan pelanggaran/permasalahan BHAM	
BPHN					
3.	Belum adanya Dasar Hukum yang kuat, sehingga antusias/partisipasi Pemerintah Daerah kurang mendukung baik dalam sarana dan prasana (tidak tersedianya anggaran khusus untuk melaksanakan kegiatan tsb)	Maret	1. Rapat persiapan 2. Surat usulan penyampaian Desa/Kelurahan yang akan dijadikan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Binaan di setiap wilayah	1. Surat undangan rapat (Undangan,Absensi ,Notula, Gambar/Dokumentasi) 2. Surat usulan Desa/Kelurahan Binaan dari masing-masing wilayah	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Bidang Hukum / Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum)
		Juni	1. Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Kadarkum di masing-masing wilayah 2. Penyusunan SK Kelompok Kadarkum yang ditandatangani oleh Camat/Lurah/ Kepala Desa 3. Implementasi kuesioner indeks desa/kelurahan Sadar Hukum dalam Dimensi Akses informasi Hukum	1. SK Kelompok Kadarkum yang ditandatangani oleh Camat/Lurah/ Kepala Desa 2. Laporan Pembentukan dan Pembinaan kelompok Kadarkum masing-masing wilayah (Undangan, Absensi, Notula, Gambar/Dokumentasi)	
		September	1. Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Binaan di masing-masing wilayah 2. Penyusunan SK Desa/Kelurahan Binaan yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota 3. Implementasi kuesioner Indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum dalam Dimensi Implementasi Hukum, Dimensi Akses Keadilan, Dimensi Akses Demokrasi	1. SK Desa/Kelurahan Binaan yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota 2. Laporan Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Binaan di masing-masing wilayah (Undangan, Absensi, Notula dan Gambar/Dokumentasi)	
		Desember	Menyusun laporan capaian target Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Binaan di masing-masing wilayah dan rencana usulan pembentukan dan pembinaan Desa/Kelurahan tahun berikutnya	Laporan akhir capaian kinerja	

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
4.	Pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh PBH harus dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran sesuai standar layanan bantuan hukum sebagaimana diamanatkan dalam UU Bantuan Hukum serta peraturan pelaksana lainnya. Capaian realisasi anggaran Bantuan Hukum setiap tahunnya terealisasi secara maksimal, namun dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum tidak hanya dari sisi realisasi anggaran tetapi yang lebih penting adalah terkait kualitas layanan bantuan hukum yang telah diberikan oleh PBH. Berdasarkan Indeks Kinerja PBH atas kualitas layanan bantuan hukum yang telah diberikan PBH kepada Penerima Bantuan Hukum yang dihasilkan melalui wawancara kepada Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan nilai persepsi atas pelayanan bantuan hukum yang diterimanya, pada tahun 2023 baru dilakukan penilaian kinerja PBH sebanyak 506 PBH dari 619 PBH atau sebesar 81.7 %. Sehingga penilaian kinerja PBH atas kualitas layanan bantuan hukum perlu ditingkatkan.	Juni	25% Pemberi Bantuan Hukum dilakukan Survey Layanan Bantuan Hukum terhadap Penerima Bantuan Hukum	1. Data penerima Bantuan Hukum yang dilakukan monitoring dan evaluasi dari aplikasi Sidbankum 2. Data PBH yang sudah dan belum di dilakukan monitoring dan evaluasi	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Bidang Hukum / Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum)
		September	50% (B06: 25% + B09: 25%) Pemberi Bantuan Hukum dilakukan Survey Layanan Bantuan Hukum terhadap Penerima Bantuan Hukum	1. Data penerima Bantuan Hukum yang dilakukan monitoring dan evaluasi dari aplikasi Sidbankum 2. Data PBH yang sudah dan belum di dilakukan monitoring dan evaluasi	
		Desember	85% (B09: 50% + B12: 35%) Pemberi Bantuan Hukum dilakukan Survey Layanan Bantuan Hukum terhadap Penerima Bantuan Hukum	1. Data penerima Bantuan Hukum yang dilakukan monitoring dan evaluasi dari aplikasi Sidbankum 2. Data PBH yang sudah dan belum di dilakukan monitoring dan evaluasi	
5.	Belum meratanya sebaran Pemberi Bantuan Hukum (PBH) di kabupaten/kota. Sebaran PBH setelah verifikasi dan akreditasi periode tahun 2022 s.d. 2024 di setiap kab/kota baru sebesar sekitar 54% atau sebanyak 279 dari 514 kab/kota, hal ini berdampak pada akses pemberian bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang belum merata atau hanya hanya di kab/kota yang sudah ada PBHnya. Sehingga, pelaksanaan verifikasi dan akreditasi di Tahun 2024 untuk periode 2025-2027 diharapkan terjadi peningkatan sebaran PBH terakreditasi di setiap kab/kota dalam rangka pemerataan dan perluasan pemberian layanan bantuan hukum.	Maret	Penunjukkan Pokjada Pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum	SK Tim Pokjada Verifikasi dan Akreditasi	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Bidang Hukum / Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum)
		Juni	Pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi (PBH baru)	Rekomendasi Akreditasi PBH Baru	
		September	Pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi (PBH lama)	Rekomendasi Akreditasi PBH Lama	
		Data Aplikasi Sistem Informasi Database Bantuan Hukum	Maret	Sosialisasi <i>Paralegal Justice Award</i>	Laporan Pelaksanaan sosialisasi

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
	<p>(Sidbankum) 3 tahun terakhir perkara bantuan hukum litigasi rata-rata sebanyak kurang lebih 12.000 perkara dengan serapan anggaran APBN rata-rata 98,70%. Namun, dari jumlah perkara yang ditangani melalui layanan bantuan hukum didominasi dengan perkara pidana sebesar 70% dan perdata sebesar 30%. Adapun jenis-jenis perkara yang ditangani tersebut rata-rata merupakan perkara ringan yang timbul dari perselisihan antar warga di masyarakat yang tentunya dari wilayah pedesaan. Hal ini pun secara tidak langsung berdampak pada over capacity-nya jumlah warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan yang berdasarkan data Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) saat ini prosentase over capacity sebesar 109%.</p> <p>Di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peradilan di bawahnya terjadi peningkatan signifikan akan volume perkara dari tahun ke tahun dan hal ini tidak diikuti dengan peningkatan jumlah Hakim dan ASN baik di daerah maupun di pusat. Hal ini berdampak pada peningkatan beban kerja Hakim dan ASN di lingkungan peradilan serta prosentase penyelesaian perkara di lingkungan peradilan.</p> <p>Oleh sebab itu, penting peran Kepala Desa/Lurah sebagai juru damai dalam penyelesaian konflik di desa/kelurahan atau berperan sebagai Paralegal. Peran kepala desa/lurah bukan saja memiliki kapasitas sebagai pemimpin formal untuk menjalankan urusan-urusan administrasi pemerintahan, akan tetapi secara informal menjadi tokoh sentral yang dipatuhi oleh warganya dan diharapkan menjadi pengavom yang</p>	Juni	Pelaksanaan seleksi <i>Paralegal Justice Award</i>	Usulan peserta <i>Paralegal Academy</i>	dan HAM (Bidang Hukum / Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum)
DITJEN AHU					
6.	Belum tersedianya pemutakhiran data Fidusia dalam rangka peningkatan Kualitas layanan Fidusia dan Jumlah Pendaftaran Fidusia	Maret - November	Penyebaran informasi terkait dengan kewajiban penghapusan jaminan fidusia yang telah selesai masa di wilayah	Laporan Penyebaran informasi terhadap terkait pendaftaran, perubahan penghapusan Jaminan Fidusia kepada masyarakat, notaris dan lembaga pembiayaan di wilayah	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Bidang Pelayanan Hukum / Sub Bidang Pelayanan Hukum Umum)
7.	Masih terdapat Ketidaksinkronan data Notaris antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Januari - Maret	Kantor Wilayah menghimpun data Notaris untuk dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, untuk kemudian dilakukan sinkronisasi dengan database Ditjen AHU	Laporan Hasil Konfirmasi Data Notaris antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Ditjen AHU Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Bidang Pelayanan Hukum / Sub Bidang Pelayanan Hukum Umum)
		Mei - Desember	Implementasi Migrasi Data Notaris	Database notaris yang telah sinkron antara Data Ditjen AHU dengan data yang tersedia di Kanwil	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Bidang Pelayanan Hukum / Sub Bidang Pelayanan Hukum Umum)
DITJEN KI					

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
8.	Masih Rendahnya pemahaman masyarakat atas Indikasi Geografis mengakibatkan rendahnya permohonan Indikasi Geografis	Maret	1. Koordinasi dengan pemerintah daerah (dinas terkait) memetakan potensi IG yang ada di wilayah 2. Inventarisasi produk IG terdaftar yang ada di wilayah setempat 3. Identifikasi Pihak – pihak yang terkait dengan Penguatan kelembagaan dan pengawasan Indikasi Geografis	1. Laporan Koordinasi 2. Daftar inventarisasi produk IG 3. Daftar pihak-pihak terkait	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Bidang Pelayanan Hukum / Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual)
		Agustus	1. Sosialisasi dan pendampingan kepada pemohon, dinas atau pemda setempat terkait dengan produk yang akan diajukan atau sedang dalam proses 2. Terbentuknya Pokja Penguatan kelembagaan dan pengawasan di daerah melalui SK yang ditandatangani oleh Kakanwil/ Gubernur 3. Menyusun Pedoman dan Standar Pengawasan IG di Daerah dengan Berkoordinasi pemerintah daerah (dinas terkait), atau stakeholder terkait lainnya yang ada di daerah	1. Laporan Hasil Koordinasi 2. SK Pokja per wilayah 3. Dokumen Pedoman dan Standar Pengawasan IG	
		September	Pengajuan permohonan Indikasi Geografis baru dan atau menyelesaikan minimal 1 permohonan Indikasi Geografis yang masih dalam proses	Bukti permohonan pendaftaran Indikasi Geografis	
		Desember	1. Berkoordinasi dengan pemda setempat terkait dengan potensi IG yang dapat diajukan permohonannya di tahun 2025 2. Tindak lanjut Pokja yang sudah terbentuk	1. Laporan Hasil Koordinasi dan daftar potensi IG tahun 2025 2. Laporan Tindak Lanjut Pokja	
9.	Masih Rendahnya pemahaman masyarakat atas Merek Kolektif mengakibatkan rendahnya permohonan merek kolektif	Februari - Juni	Diseminasi Merek Kolektif	pemahaman terkait merek kolektif	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Bidang Pelayanan Hukum / Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual)
		Juli s.d Nov	Pengajuan Permohonan Pendaftaran Merek Kolektif 1 wilayah 1 merek kolektif	Laporan dan Bukti Permohonan 1 Merek Kolektif	
		Desember	Monitoring dan evaluasi	laporan monev terhadap tindak lanjut di Tahun 2025	
10.	Persiapan kerja sama kearah dengan target mitra kementerian dalam negeri, dan koneksi antara Bappenas dengan pemerintah daerah-->diarahkan untuk mendorong pendaftaran IG dari masing-masing daerah	Triwulan 1-2	1) Persiapan penajakan dengan mitra forum Gugug Tugas IG; 2) Pembentukan Gugus Tugas Indikasi Geografis sebagai forum koordinasi antara stakeholder lintas Kementerian/Lembaga/Pemda untuk mendorong pendaftaran IG dari wilayah	1. Tim Pusat: SK Bersama? SK Menkumham? 2. Tim Wilayah: SK Gubernur? SK Kakanwil?	Direktur KSE Pokja Kerja Sama Dalam Negeri Pokja Layanan IG Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Bidang Pelayanan Hukum / Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual)
11.	Permohonan paten dalam negeri yang masih rendah dibandingkan dengan total permohonan paten, sehingga memerlukan upaya untuk mendorong permohonan baru dalam negeri melalui pemanfaatan informasi penelusuran dokumen paten pada 33 provinsi	Januari - Februari	Januari - Februari Koordinasi dan Pemetaan Calon Peserta	Laporan Koordinasi Laporan Calon Peserta Perlu Detail Informasi : - Kategori audiens - Lokasi tempat - Pembagian anggaran	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Bidang Pelayanan Hukum / Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual)
		Maret - Agustus	Maret - Agustus Pelaksanaan kegiatan Asistensi Teknis Permohonan dan Penelusuran Dokumen Paten	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Asistensi Teknis Permohonan dan Penelusuran Dokumen Paten	
		September	September Evaluasi Kegiatan dan Rencana Tindak Lanjut	Laporan Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut Kegiatan Asistensi Teknis Permohonan dan Penelusuran Dokumen Paten	
12.	Persentase permohonan paten dalam negeri yang tidak bisa digrant yang tinggi, sehingga memerlukan upaya untuk	Maret - April	Maret - April Koordinasi dan Pemetaan Calon Peserta	Laporan Koordinasi Laporan Calon Peserta	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Bidang

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
13.	pendampingan penyusunan dokumen permohonan paten yang baik dan benar kepada para calon pemohon paten (asistensi Drafting Paten)	Mei - Oktober	Mei - Oktober Pelaksanaan Kegiatan Asistensi Teknis Paten Drafting	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Asistensi Teknis Paten Drafting	Pelayanan Hukum / Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual
		November	November Evaluasi Kegiatan dan Rencana Tindak Lanjut	Laporan Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut Kegiatan Asistensi Teknis Paten Drafting	
	Tren permohonan desain industri beberapa tahun terakhir mengalami stagnasi dan penurunan di dalam negeri, serta mulai munculnya beberapa permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan mekanisme perlindungan desain industri	Januari	B01 : - koordinasi dengan Stakeholder terkait - Membentuk Tim Inventarisasi Data Potensi Desain Industri SK Tim	B01 : - Laporan koordinasi - SK Tim	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Bidang Pelayanan Hukum / Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual)
		Februari	B02 : Koordinasi DJKI dan Kanwil Kumham secara virtual, dimana DJKI akan menyampaikan petunjuk pelaksanaan inventarisasi data potensi desain industri Laporan pertemuan virtual yang dilampiri dengan dokumentasi	B02 : Laporan pertemuan virtual yang dilampiri dengan dokumentasi	
		Maret	B03 : Melaksanakan rapat persiapan rencana aksi inventarisasi data potensi desain industri Laporan yang dilampiri notula rapat dan dokumentasi	B03 : Laporan yang dilampiri notula rapat dan dokumentasi	
		April-Mei	B04 – B05 : Melaksanakan koordinasi dengan pemangku kepentingan di wilayah masing-masing Laporan koordinasi yang dilampiri dokumentasi	B04 – B05 : Laporan koordinasi yang dilampiri dokumentasi	
		Juni-Juli	B06 – B07 : Melaksanakan kegiatan inventarisasi potensi desain industri sektor industri kreatif Laporan kegiatan yang dilampiri dokumentasi	B06 – B07 : Laporan kegiatan yang dilampiri dokumentasi	
		Agustus-September	B08 – B09 : Melaksanakan kegiatan inventarisasi potensi desain industri sektor pendidikan Laporan kegiatan yang dilampiri dokumentasi	B08 – B09 : Laporan kegiatan yang dilampiri dokumentasi	
		Oktober	B10 : Melaksanakan kegiatan inventarisasi potensi desain industri sektor asosiasi pengusaha atau industri Laporan kegiatan yang dilampiri dokumentasi	B10 : Laporan kegiatan yang dilampiri dokumentasi	
		November	B11 : Menyampaikan hasil inventarisasi potensi desain industri ke DJKI Laporan Potensi Desain Industri di wilayah	Laporan Potensi Desain Industri di wilayah	
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN					
14.	Kualitas penataan regulasi yang belum merata dibuktikan dengan tingkat partisipasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penilaian IRH belum optimal	Januari - Februari	Sosialisasi Indeks Reformasi Hukum kepada Pemerintah Daerah	Laporan Sosialisasi Indeks Reformasi Hukum	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Bidang HAM / Sub Bidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan HAM)
Maret	Pembinaan dan Pendampingan Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah	Laporan Hasil Pembinaan dan Pendampingan Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah			
April-Agustus	1. Monitoring pengunggahan data dukung dan verifikasi penilaian mandiri oleh Pemerintah Daerah pada aplikasi penilaian Indeks Reformasi Hukum 2. Verifikasi faktual dan validasi data dukung hasil penilaian mandiri Pemerintah Daerah	1. Laporan Hasil Monitoring pengunggahan data dukung dan verifikasi penilaian mandiri oleh Pemerintah Daerah 2. Laporan Hasil verifikasi faktual dan validasi data dukung hasil penilaian mandiri Pemerintah Daerah			
November-Desember	Evaluasi pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum di Wilayah	Laporan Evaluasi pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum di Wilayah			